BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

3.1.1 Sejarah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu cukup jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, secara pasti tidak diketahui berapa lama Kota Bandung dibangun. Kota Bandung dibangun bukan atas prakarsa Daendles, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung. Pembangunan Kota Bandung langsung dipimpin oleh Bupati. Bupati R. A Wiranatakusuma II adalah pendiri (*the founding father)* Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810. Awalnya, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeh Kolot) kira-kira 11 kilometer kearah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yaitu R.A Wiranatakusuma II (1794-1829) yang dijuluki *"Dalem Kaum1",* kekuasaan di Nusantara beralih dari komponen ke pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jendral pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur kira-kira 1000 km) untuk kelancaran tugasnya di Pulau Jawa. Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan

yang telah ada. Jalan raya pos itu adalah Jalan Raya Sudirman, Jalan Raya Asia Afrika, jalan Raya Ahmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya.

Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan. Tahun 1808 atau awal 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan yang akan dijadikan ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti). Kemudian berpindah ke Balubur Hilir, selanjutnya berpindah ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang). Tanggal 21 Februari 1906, pada masa pemerintahan R.A.A Martanegara (1893-1918).

Kota Bandung sebagai ibukota Kabupaten Bandung, statusnya berubah menjadi Gemente (*Kota Pradja*), dengan pejabat Walikota pertama adalah tuan B.Coops. Sejak saat itulah Kota Bandung resmi terlepas dari pemerintahan Kabupaten Bandung sampai sekarang.

3.1.2 Letak Geografis Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 1070 –

430 Bintang Timur dan 60 00 – 60 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit, sehingga merupakan panorama yang indah. Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kota Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing,maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin. Lokasi Kota Bandung cukup strategis baik dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan, hal ini disebabkan:

1) Kota Bandung terletak pada poros pertemuan poros jalan raya :

   a. Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara.

   b. Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).

Kota Bandung juga mempunyai Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya.

3.1.3 Gambaran Umum Usaha Kecil Menengah Kota Bandung.

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Bandung berkembang semenjak tahun 2000an, hal ini disebabkan oleh perkembangan perekonomian di Kota Bandung yang terus menunjukan perkembangan setiap tahunnya sehingga, menjadi sebuah sektor industri yang meningkatkan perekonomian.

Tabel 3.1
Potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahun 2009 s/d 2010

Sektor/Kegiatan	TAHUN	
	2009	2010
UKM	11.236	11.955
➢ Usaha Kecil	9.601	10.043
➢ Usaha Menengah	1.635	1.912

(Sumber : Diskoperindag Kota Bandung Tahun 2010 Bidang UKM)

Tabel 3.2
Jumlah UKM Binaan Dinas KUKM & Perindag Kota Bandung
Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2010

NO	KECAMATAN	JUMLAH MIKRO	JUMLAH KECIL	JUMLAH MENENGAH	JUMLAH
A	**DATA UKM KOTA BANDUNG**				
1	BOJONG LOA KALER	8	0	0	8
2	BABAKAN CIPARAY	1	0	0	1
3	BANDUNG KULON	1	1	0	2
4	ASTANA ANYAR	1	1	0	2
5	BOJONGLOA KIDUL	0	0	0	0
6	SUKASARI	0	0	0	0
7	CICENDO	3	0	0	3
8	SUKAJADI	0	0	0	0
9	ANDIR	1	1	0	2
10	CIDADAP	0	0	0	0
11	COBLONG	4	1	0	5
12	BANDUNG WETAN	2	0	0	2
13	SUMUR BANDUNG	3	0	0	3
14	CIBEUNYING KIDUL	0	1	0	1
15	CIBEUNYING KALER	1	1	0	2
16	BUAH BATU	4	2	0	6
17	BANDUNG KIDUL	3	2	0	5
18	GEDEBAGE	1	0	0	1
19	RANCASARI	9	0	0	9
20	REGOL	2	0	0	2
21	LENGKONG	4	0	0	4
22	KIARACONDONG	6	0	0	6
23	BATUNUNGGAL	6	0	0	6
24	UJUNG BERUNG	1	0	0	1
25	ARCAMANIK	4	0	0	4
26	CIBIRU	7	0	0	7
27	ANTAPANI	4	0	0	4
28	PANYILEUKAN	3	0	0	3
29	CINAMBO	0	0	0	0
30	MANDALA JATI	0	0	0	0
	J U M L A H U K M	**79**	**10**	**0**	**89**

(Sumber : Diskoperindag Kota Bandung Tahun 2010 Bidang UKM)

3.2 Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

3.2.1 Sejarah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung No. 13 Tahun 2007, merupakan penggabungan dua dinas yaitu dinas koperasi kota Bandung dan dinas perdagangan perindustrian kota Bandung. Dinas koperasi kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah departemen koperasi di tingkat kabupaten kota yang diberi nama kantor departemen koperasi pengusaha kecil perdagangan. Di era otonomi daerah sebagai konsekuensi logis pemerintah memberikan peraturan No. 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah dinas koperasi kota Bandung dan dinas perindustrian dan perdagangan yang semula merupakan di bawah instansi vertikal yaitu departemen perindustrian dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintah maka terjadilah penggabungan antara koperasi kota Bandung dan koperasi perindustrian perdagangan kota Bandung No. 13 Tahun 2007.

Rencana Strategis dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintah kota Bandung.

Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah kabupaten / kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bandung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang harus diaplikasikan dan di implementasikan ke dalam Visi dan Misi SKPD sesuai bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

Visi dan Misi pada Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan terangkum sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kota bandung melalui pengembangan koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan menuju bandung bermartabat tahun 2008. Definisi operasional dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi harus

melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan UKM serta menciptakan kesempatan kerja

MISI :

a. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
b. Meningkatkan Peranan Koperasi dan UKM yang Berdaya Saing
c. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM
d. Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan
e. Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan serta sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen
f. Mengembangkan kegiatan promosi luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas/ *globalisasi*

TUJUAN

a. Meningkatkan pembinaan, pengembangan usaha Koperasi, usaha kecil dan menengah agar memiliki daya saing usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota
b. Membangun dan mengembangkan struktur industri dalam upaya menunjang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan
c. Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang maju dan mandiri dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memasuki pasar global dengan meningkatkan daya saing dan mengembangkan sistem pemasaran ekspor serta pengendalian impor

d. Meningkatkan kegiatan informasi perdagangan barang dan jasa dalam negeri serta menciptakan tertib niaga dan pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen
e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi dan pameran dagang.

SASARAN

a. Meningkatkan lembaga Koperasi yang aktif dan sehat
b. Meningkatnya peranan Koperasi dalam penyediaan Barang dan Jasa bagi anggota
c. Meningkatnya kemampuan Koperasi Usaha Kecil menengah dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran
d. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
e. Meningkatnya kemitraan antara Koperasi, Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar
f. Terwujudnya struktur industri yang kuat dengan didukung oleh kerjasama antar sektor ekonomi lainnya
g. Meningkatkan peran dan daya dukung IKM dalam struktur industri dan perekonomian kota Bandung
h. Meningkatkan ekspor dari Kota Bandung dengan kualitas barang yang memliliki daya saing dan berwawasan lingkungan
i. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku dunia usaha dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produk

j. Terciptanya sistem produksi dan pemasaran barang dan jasa dengan standar harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui tertib niaga dan perlindungan konsumen

k. Meningkatnya jumlah wira usaha baru dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kota

visi,misi, tujuan dan sasaran dijelaskan bahwa setiap program Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, sesuai dengan pelaksanaan. Sebagai sebuah contoh adalah sistem informasi *e-market* yang mereka buat agar tercapainya sebuah visi dan misi serta sasaran dan tujuan yang sesuai dengan program yang mereka buat. Hal ini dibuat agar setiap pemerintah daerah dan Dinas terkait menjalankan program-programnya sesuai dengan tujuan dari dinas tersebut. *E-market* merupakan upaya dari Diskoperindag Kota Bandung dalam mensejahterakan masyarakat UKM dalam memasarakan Produk barang mereka sehingga memudahnkan proses jual- beli.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan Untuk melaksanakan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan
b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan yang meliputi industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil menengah
d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2007 tentang otonomi daerah dan lampiran peraturan daerah mengenai bagan struktur organisasi dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan kota Bandung adalah pelaksana tugas dan fungsi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi, adapun struktur organisasi itu sebagai berikut:

1. Kantor Dinas KUKM dan perindag kota Bandung dipimpin oleh seorang kepala.

2. Seretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian keuangan dan program.
3. Bidang industri kecil dan dagang kecil non formal terdiri dari seksi industri kecil non formal dan seksi perdagangan barang dan jasa non formal.
4. Bidang industri formal terdiri dari seksi industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik serta seksi industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.
5. Bidang perdagangan terdiri dari seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan, seksi perlindunga konsumen dan kemetrologian serta seksi ekspor-impor dan hubungan kerja sama luar negeri.
6. Bidang kelembagaan dan pendaftaran terdiri dari seksi bina kelembagaan koperasi dan seksi pendaftaran.
7. Bidang pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam terdiri dari seksi pengembangan usaha produksi dan jasa, seksi pengembangan usaha konsumsi serta seksi pengembangan usaha simpan pinjam. Bidang usaha kecil dan menengah terdiri dari seksi usaha kecil dan mikro dan seksi usaha menengah. Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

3.2.4.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, terdiri dari :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun

2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas daerah yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung struktur organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, membawahkan :
    a. Seksi Industri Kecil Non Formal
    b. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal.
4. Bidang Industri Formal, membawahkan :
    a. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik.
    b. Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika.
5. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan.
    b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.
    c. Seksi Eksport-Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.
6. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran, membawahkan :
    a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi.
    b. Seksi Pendaftaran.
7. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam, membawahkan :

a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa.

b. Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi.

c. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam.

8. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :

a. Seksi Usaha Kecil dan Mikro.

b. Seksi Usaha Menengah.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung pada **Gambar 3.1**

3.2.4.2 Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan walikota bandung nomor 475 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi satuan organisasi pada dinas daerah kota Bandung **:**

1. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bdang koperasi ukm dan perindustrian perdagangan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijaan teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah.
   b. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil menengah.
   c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil menengah.
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. dan

e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelengaraan kegiatan dinas

2. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

(1). Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup usaha kecil dan menengah.

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah.

b. Penyusanan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah. dan

c. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah. dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah.

1) Seksi Usaha Kecil dan Mikro

(1). Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang usaha kecil dan menengah lingkup usaha kecil dan mikro.

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha kecil dan mikro.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro.

c. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro meliputi iventarisasi dan identifikasi potensi udaha kecil dan mikro, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha, pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan serta pembinaan dan serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi. Pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha kecil dan mikro. dan
d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro.

Tugas pokok dan fungsi dari bidang usaha kecil menengah adalah dengan memberikan peluang kepada UKM dalam mengembangkan usahanya sehingga bidang UKM ini membuat sebuah portal *e-market* yang dirancang untuk mengembangkan usaha UKM yang ada di Kota Bandung.

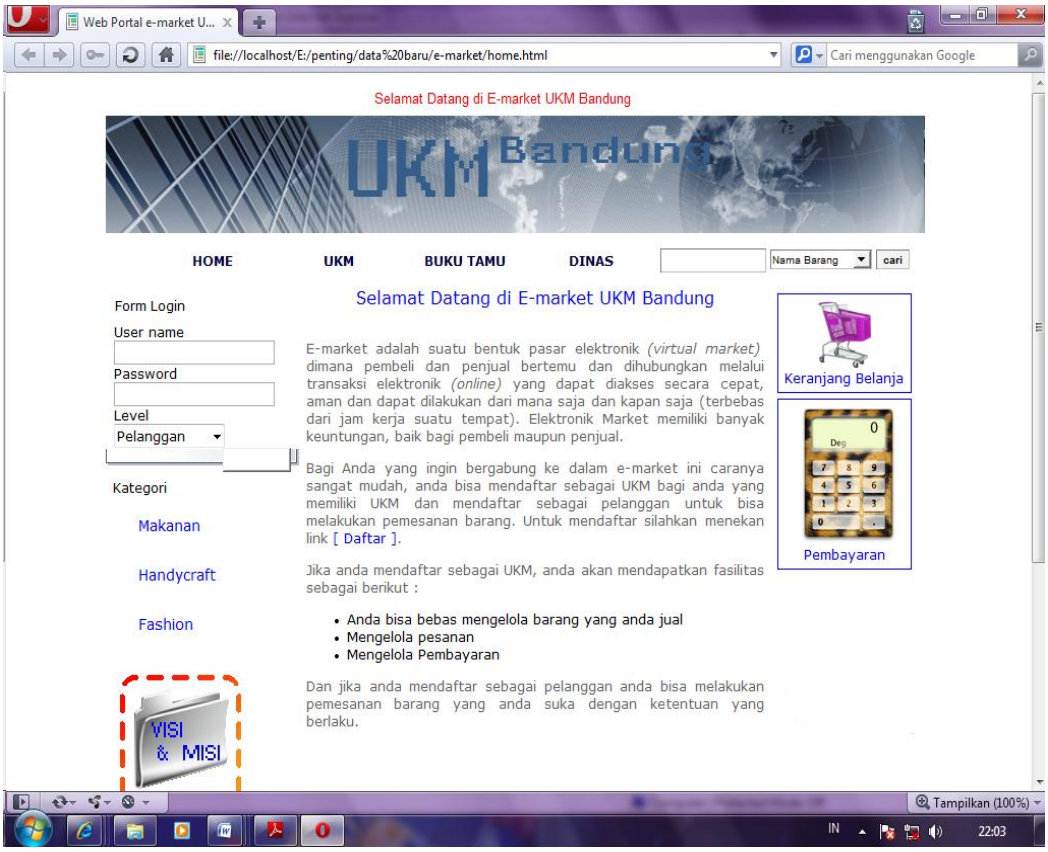
3.3 *E-market* Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

E-market atau pemasaran produk secara *on line* merupakan aplikasi penggunaan teknologi informasi yang dibuat oleh aparatur Diskoperindag dalam memfasilitasi UKM untuk menyajikan informasi tentang produknya pada pengguna dan dapat melakukan transaksi dengan pengguna di lokasi yang berbeda. Tujuan dari *e-market*, yaitu promosi dan pemasaran produk pada pelanggan.

Pada aplikasi *e-market* ini menggunakan bahasa pemrograman *Active Server Page* (ASP) dan *Java Script.* Pada bagian ini akan dibahas mengenai perencanaan program untuk mendapatkan *input* data, menangani *database* dan pembuatan *shopping cart.* Penanganan *form* dan *database* adalah yang terpenting dan utama pada aplikasi ini. Penanganan Input Data dengan ASP Perencanaan program untuk menangani *data form* melibatkan ASP. Ada tiga macam input data dari *form* yang digunakan yaitu *textfield, list,* dan *file. Textfield* mampu menangani data isian dengan baik, berupa kata-kata dan dapat diatur lebar beserta ukuran. Pengisian inputan *password* juga dapat diterima dalam bentuk bintang (*) yang menjadi standar *input-an password.* Untuk masing-masing *textfield* memiliki nama *object* yang berbeda dan nilai yang berbeda pula sehingga dapat diperoleh parameter *object* masing-masing untuk diolah. Selain *textfield* juga terdapat *input-an list* yang berisi daftar pilihan yang ada. Dalam penerapannya, *list* juga memiliki nama *object*juga daftar nilai atau *value* dari *list.* Untuk *input-an* bertipe/i/e hanya memiliki nama *object.*

Dalam aplikasi *e-market* ini tampilan web yang dimulai dari tampilan awal hingga tampilan *shopping cart. Style* dalam aplikasi *e-market* ini menggunakan tampilan web yang konsisten. *User* hanya dihadapkan pada halaman yang *simple* (mudah) dan *style* tertentu, ini memudahkan *user* dalam melakukan aktifitas *browsing.* Penggunaan *e-market* dapat dilihat berdasarkan dari gambar berikut ini:

Gambar 3.2
Halaman Beranda *e-market*



(sumber: http://www.e-market.hostoi.com/, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

e-market yang merupakan suatu bentuk pasar elektronik *(virtual market)* dimana pembeli dan penjual bertemu dan dihubungkan melalui transaksi elektronik *(online)* yang dapat diakses secara cepat, aman dan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja (terbebas dari jam kerja suatu tempat). *Elektronik market* memiliki banyak keuntungan, baik bagi pembeli maupun penjual.

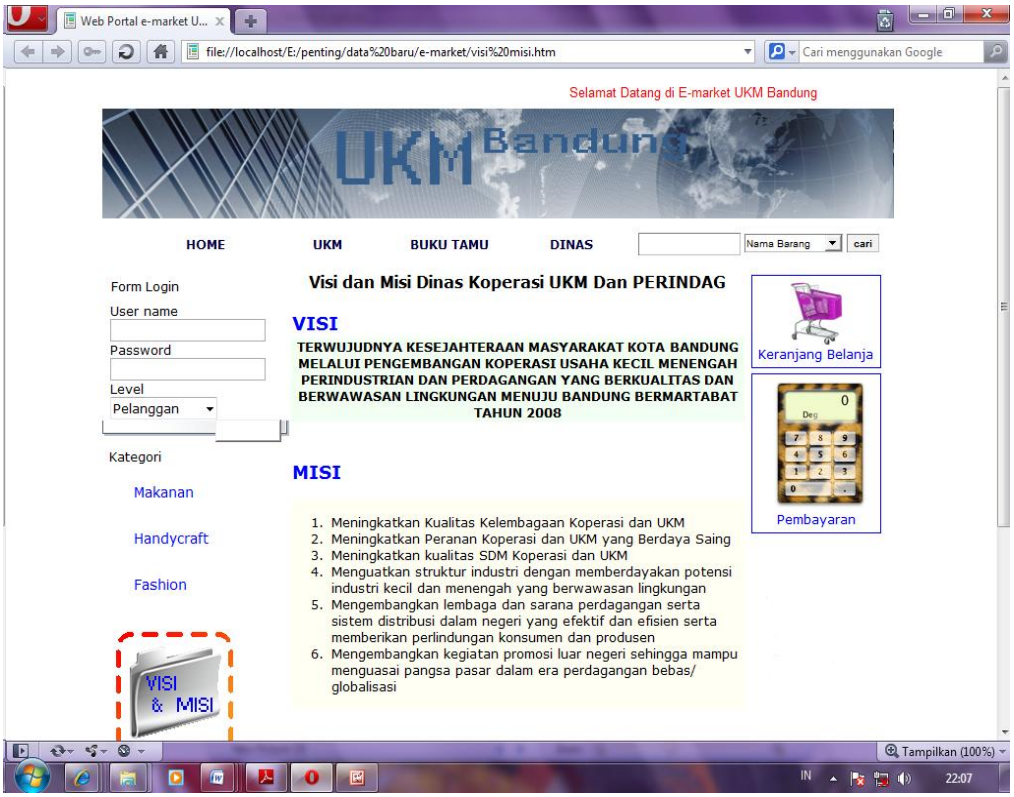
Gambar 3.3
Diskoperindag Yang menjadi Pembuat *e-market*



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Tampilan Gambaran 3.3 menjelaskan tentang dinas yang menjadi pembuat dan pelaksana program *e-market* ini, dalam gambar terlihat jelas tentang sejarah dinas dan kebijakan secara makro yang mengacu pada RPJP pemerintah kota dalam menyelengarakan sebuah fasilitas untu UKM melalui sistem informasi serta menerangkan jumlah UKM yang ada di Kota Bandung sehingga *e-market* ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

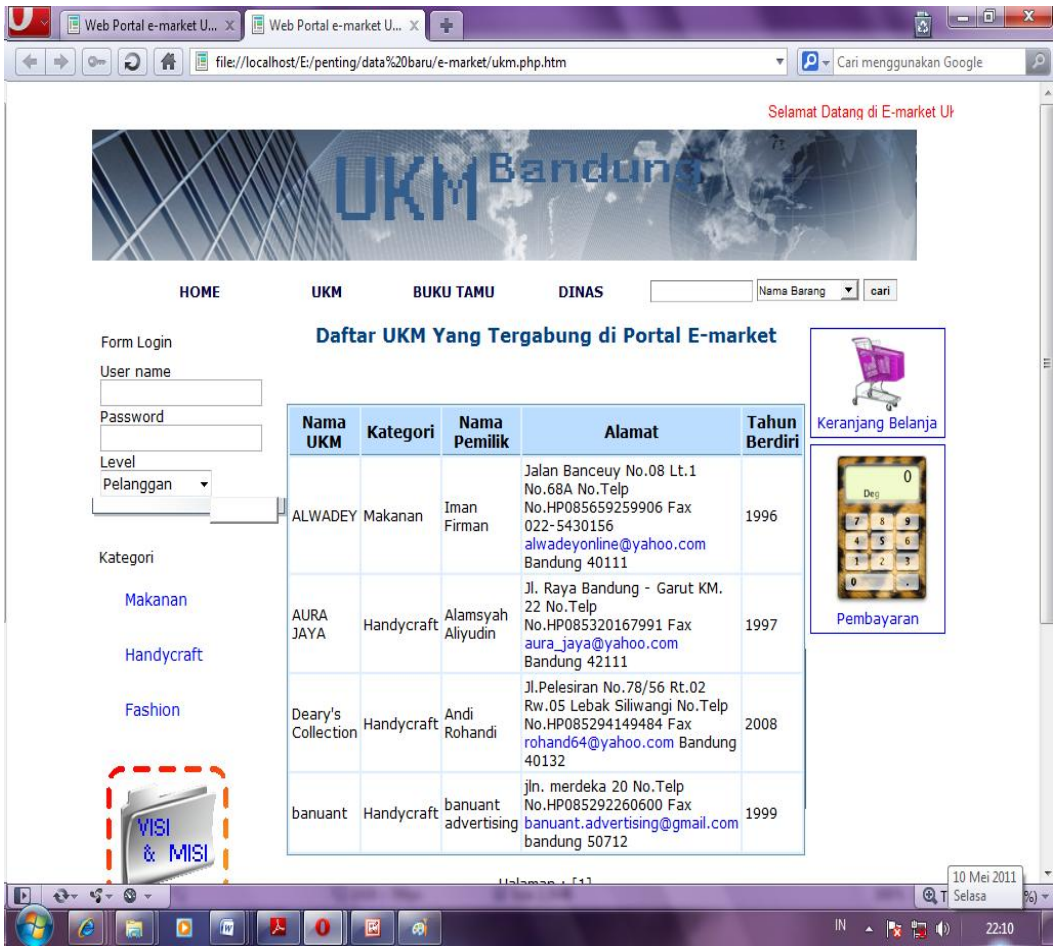
Gambar 3.4
Visi Misi Diskoperindag Sebagai Pembuat *e-market*



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Tampilan pada gambar 3.4 menjelaskan visi dan misi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung sehingga dapat terlihat jelas bahwa penyelengara dari *e-market* ini adalah Diskoperindag agar terlihat adanya kesesuaian visi dan misi dengan program suatu dinas sehingga adanya kesesuaian penyelengaraan program.

Gambar 3.5
Daftar UKM yang Tergabung di Portal *e-market*

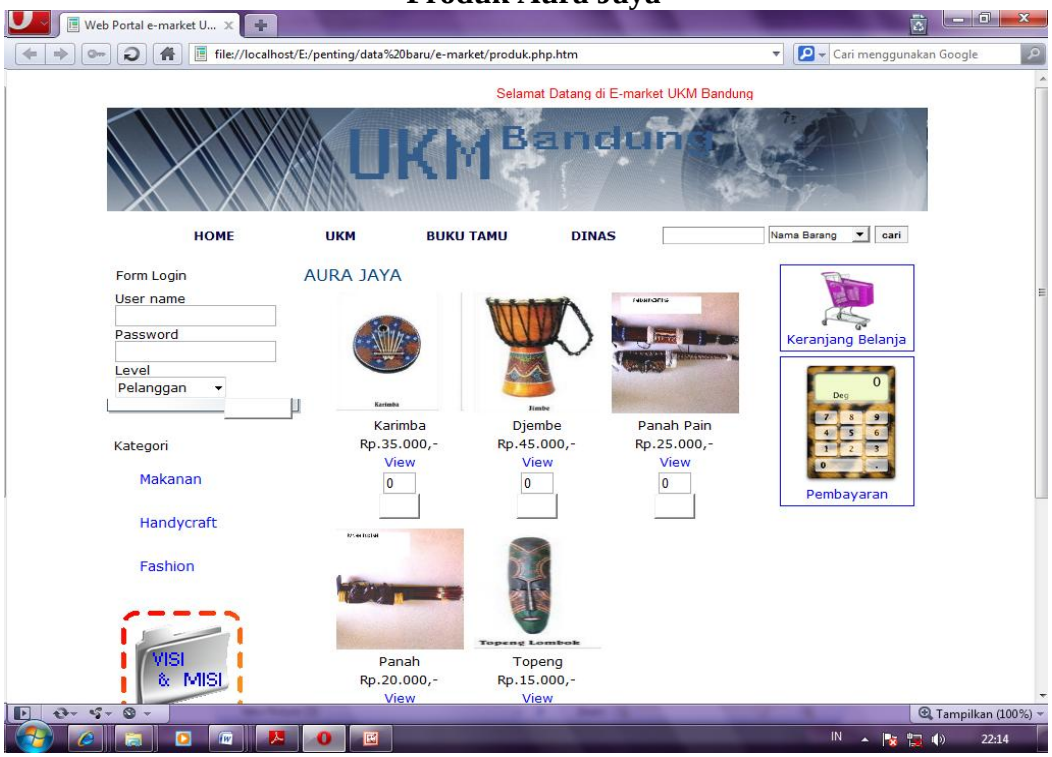


(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Pada halaman web ini mejelaskan tentang data UKM yang tergabung dalam web portal UKM ini. Sehingga memudahkan pelanggan ataupun komsumen dalam melihat identitas produsen yang mereka akan beli. Data UKM yang tertera sangat memudahkan pelanggan pada saat akan memilih barang yang akan dibeli dengan mengklik link view dan menuliskan jumlah yang akan dibeli untuk setiap produknya pembayaran dilakukan secara online dan juga secara transper sehingga pelanggan cukup diam dirumah barang yang akan dibeli datang 1 hari setelah pemesanan.

Selanjutnya pelanggan akan lebih mengetahui produk dari UKM ketika akan membeli produknya dengan melihat gambar berikut :

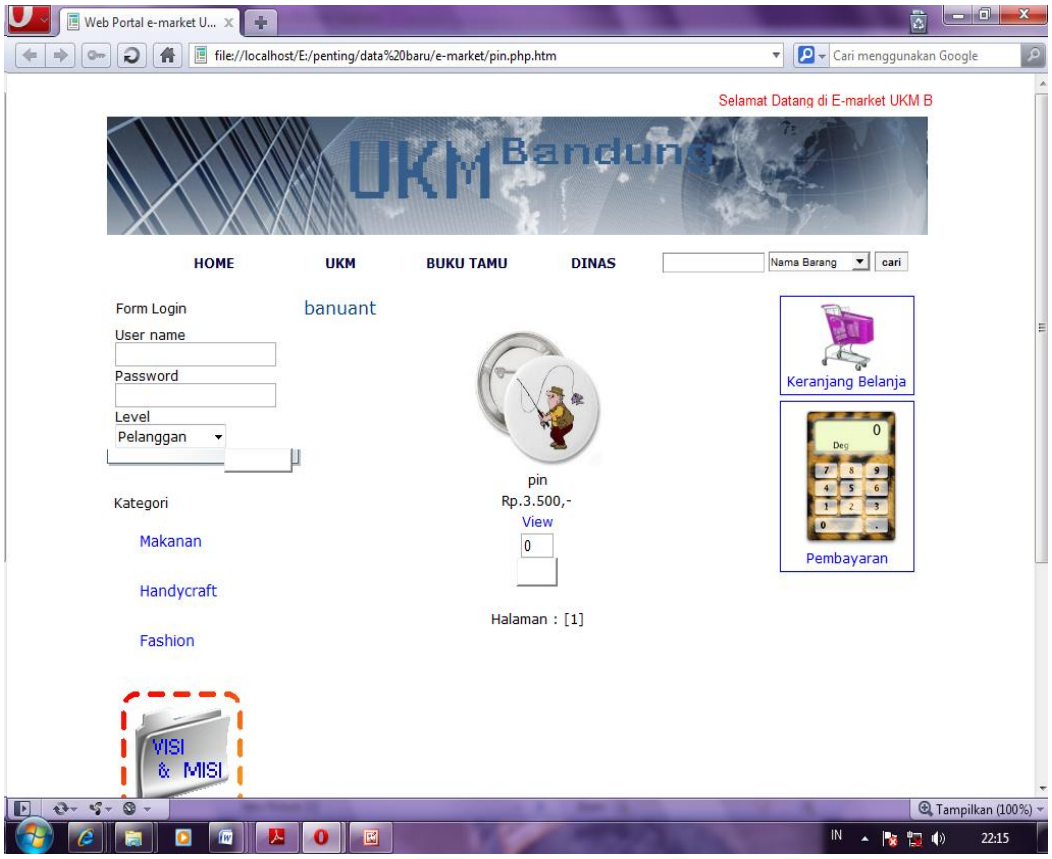
Gambar 3.6
Produk UKM yang Diperjualbelikan di Web *e-market.*
Produk Aura Jaya



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Pada halaman web ini menjelaskan barang yang dijual dan diterlihat jelas produknya melalui sebuah gambar yang dilengkapi dengan harga dan dengan mudah jika anda berminat membeli produk ini maka anda tinggal menulis jumlah banyaknya produk yang akan beli , hal ini mempermudah konsumen dalam proses jual beli, tanpa harus pergi keluar membeli barang yang diinginkan.

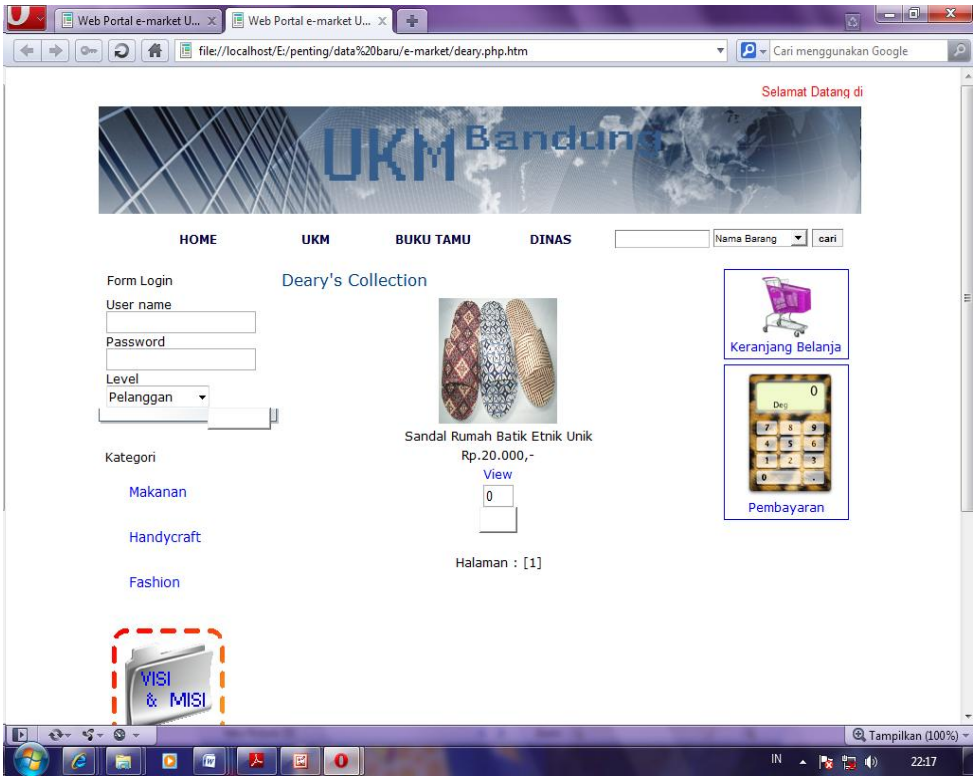
Gambar 3.7
Produk UKM yang Diperjualbelikan di Web *e-market.*
Produk Banuant



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Pada halaman web ini menjelaskan barang yang dijual dan diterlihat jelas produknya melalui sebuah gambar yang dilengkapi dengan harga dan dengan mudah jika anda berminat membeli produk ini maka anda tinggal menulis jumlah banyaknya produk yang akan beli , hal ini mempermudah konsumen dalam proses jual beli, tanpa harus pergi keluar membeli barang tersebut.

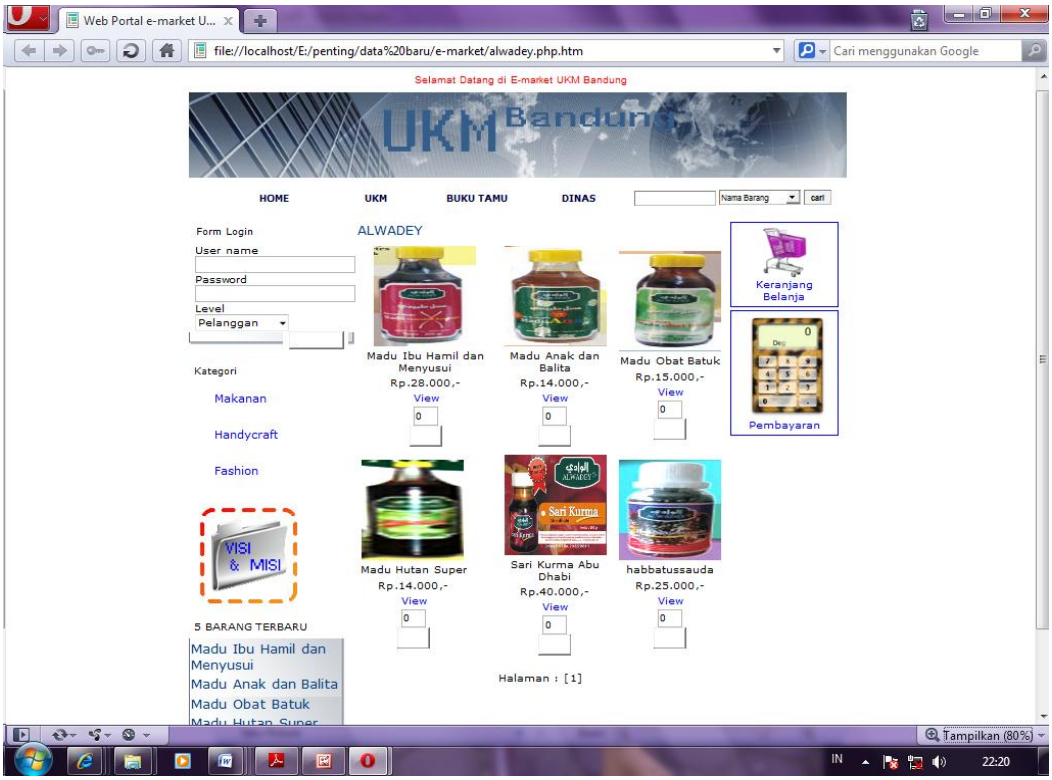
Gambar 3.8
Produk UKM yang Diperjualbelikan di Web *e-market.*
Produk *Deary's* Colection



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Pada halaman web ini menjelaskan barang yang dijual dan diterlihat jelas produknya melalui sebuah gambar yang dilengkapi dengan harga dan dengan mudah jika anda berminat membeli produk ini maka anda tinggal menulis jumlah banyaknya produk yang akan beli , hal ini mempermudah konsumen dalam proses jual beli, tanpa harus pergi keluar membeli barang yang diinginka.

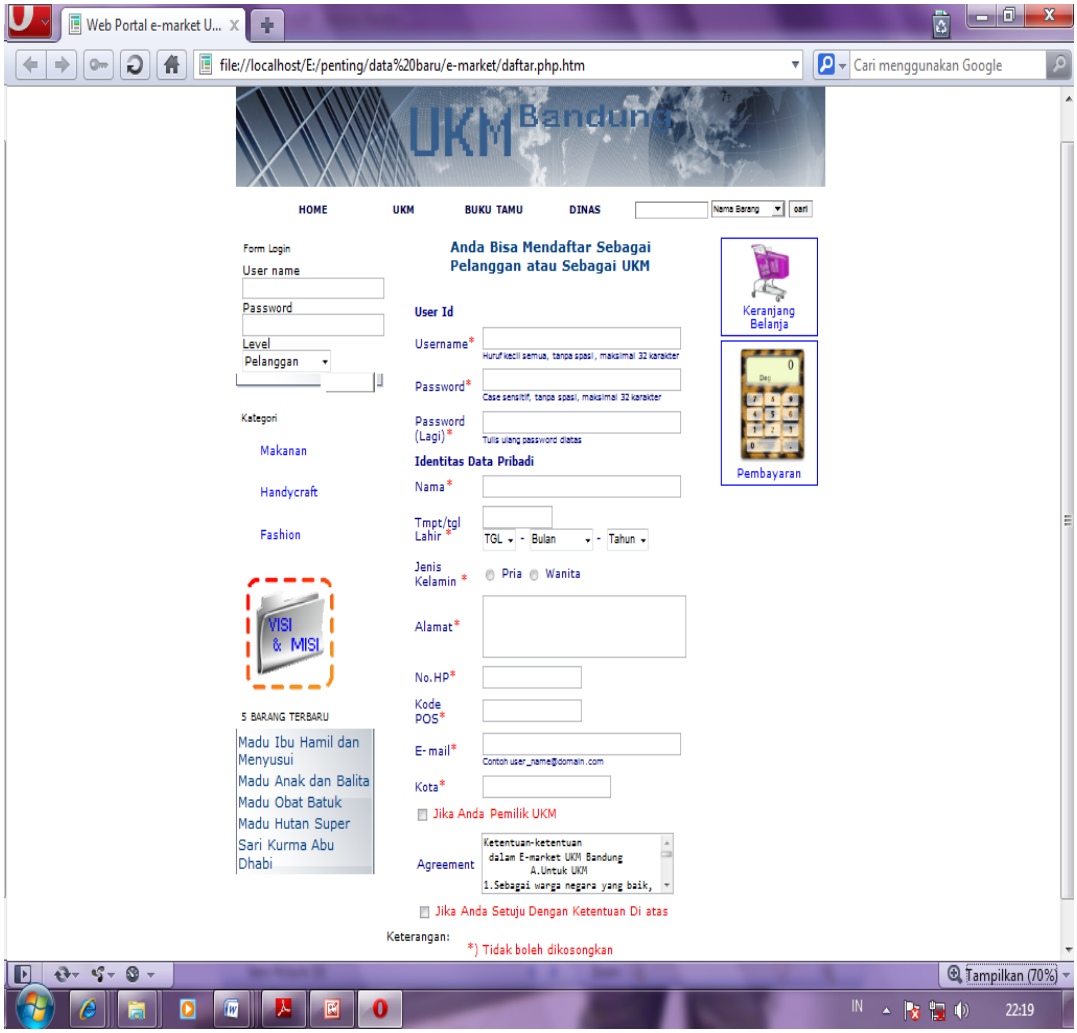
Gambar 3.9
Produk UKM yang Diperjualbelikan di Web *e-market.*
Produk Alwadey



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Pada halaman web ini menjelaskan barang yang dijual dan diterlihat jelas produknya melalui sebuah gambar yang dilengkapi dengan harga dan dengan mudah jika anda berminat membeli produk ini maka anda tinggal menulis jumlah banyaknya produk yang akan beli , hal ini mempermudah konsumen dalam proses jual beli, tanpa harus pergi keluar membeli barang yang diinginka.

Gambar 3.10
Form Pendaftaran untuk Pelanggan dan UKM yang akan ikut bergabung



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Pada halaman WEB ini menjelaskan tentan tata cara penggunaan dan pendaftaran yang perlu dilakukan jika ingin menjadi pelanggan ataupun kosumen, pendaftaran dibuat secara mudah sehingga siapapun yang memiliki UKM dapat memsarkan produknya secara gratis. Dalam kolom argreement tertera kesepatakan antara UKM dan Dinas apabila ingin menjadi pegguna *e-market*,dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan-ketentuan dalam E-market UKM Bandung

A. Untuk UKM

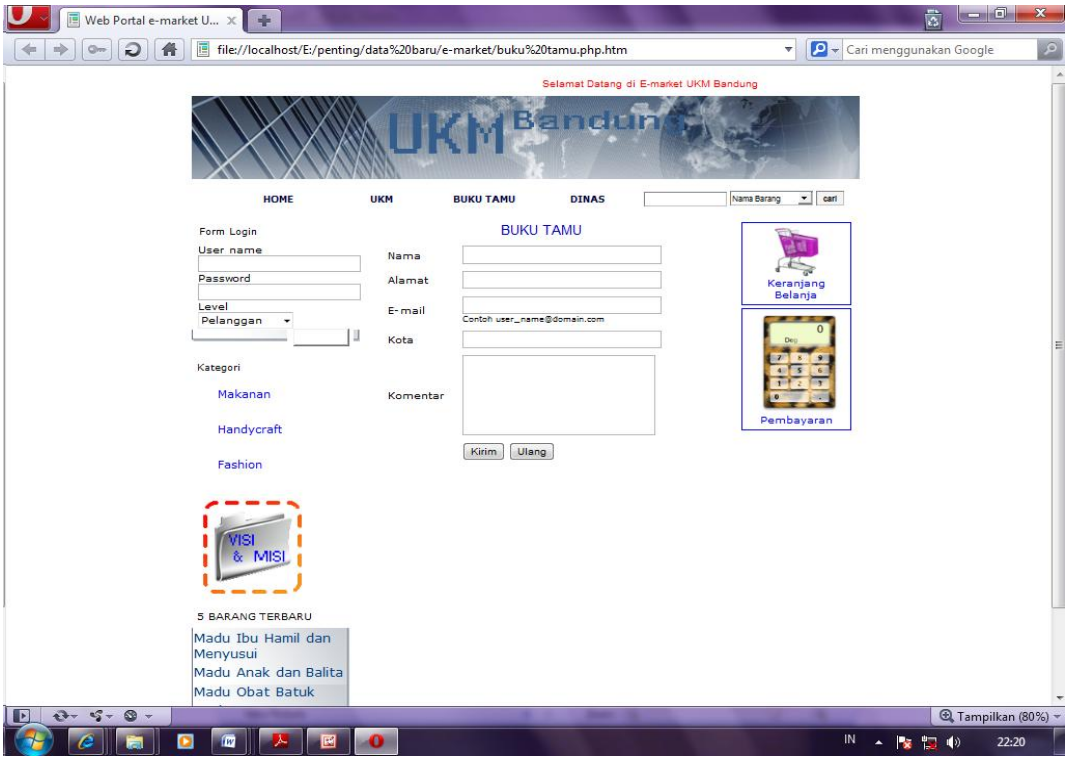
1. Sebagai warga negara yang baik, sebelum mendaftar ke e-market ini sebaiknya anda daftarkan UKM anda ke Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. yang berlamat di jalan Kawaluyaan No 2 Telp.(022) 7308385
2. Dalam e-market ini tidak di ijinkan untuk menampilkan atau menjual produk-produk yang berhubungan dengan pelanggaran asusila atau sejenisnya. Apabila ada UKM yang melanggar, maka kami dari pihak pengelola akan menghapus anda dari keanggotaan e-market secara sepihak.
3. Kami tidak bertanggung jawab dengan kegiatan transaksi yang dilakukan setiap UKM, karena kami hanya sebagai fasilitator.
4. Anda diberikan hak akses penuh dalam melakukan pengelolaan terhadap produk yang anda jual dan transaksi dengan pelanggan.

B. Untuk Pelanggan

1. Anda bisa melakukan pemesanan ke berbagai UKM tanpa batas.
2. Bila ada kekeliruan dalam proses transaksi, silahkan anda melakukan konfirmasi kepada UKM yang bersangkutan.

Selanjutnya UKM ataupun pelanggan lain dapat memberikan komentarnya dengan cara mengisi form buku Tamu sebagai berikut:

Gambar 3.11
Form Buku Tamu



(sumber: *http://www.e-market.hostoi.com/*, diakses pada tanggal 10 mei 2011)

Pada halaman WEB ini menjelaskan dengan adanya buku tamu agar setiap konsumen akan memberikan masukan ataupun opini untuk *e-market* ini, sehingga ada perubahan yang baik untuk ke depannya nanti, dan kami memberikan kesempatan dalam memberikan komentar dan saranya.

Tahapan Pengembangan *e-market*

Tahap pengembangan *e-market* di Diskoperindag memiliki empat tahap utama dan setiap tahapan memiliki urutan kerja sebagai berikut:

A. Perencanaan dan Pengorganisasian

1. Menetapkan rencana strategis pengembangan teknologi informasi
2. Menetapkan arsitektur informasi
3. Menentukan arahan teknologi
4. Menetapkan organisasi pengelola teknologi informasi
5. Mengelola Investasi di bidang Teknologi Informasi
6. Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen
7. Mengelola sumberdaya manusia
8. Memastikan kepatuhan atas standar eksternal
9. Mengelola resiko dalam *e-market*
10. Menjaga Kualitas dan mutu

B. Akusisi dan Implementasi

1. Mengidentifikasi setiap solusi
2. Mendapatkan dan memelihara aplikasi
3. Mendapatkan dan memelihara infrastruktur
4. Mengembangkan dan memelihara Prosedur
5. Instalasi dan akreditasi sistem informasi
6. Mengelola perubahan.

C. Operasionalisasi dan Dukungan

1. Menetapkan dan mengelola tingkat layanan (*Service Level*)
2. Mengelola layanan pihak ketiga
3. Mengelola kinerja dan Kapasitas
4. Memastikan kelanjutan layanan
5. Memastikan keamanan *e-market*
6. Mengidentifikasi dan mengalokasi biaya dalam pengelolaan *e-market*
7. Mendidik dan melatih penggunaan *e-market*
8. Membantu dan memberi saran kepada UKM dalam menggunakan *e-market.*
9. Mengelola insiden dan masalah yang aan dihadapi pada saat penggunaan ataupun pengelolaan data *e-market.*
10. Mengelola data UKM yang ada dalam *e-market,* dan Diskoperindag sebagai Administator sistem
11. Mengelola fasilitas yang digunakan dalam *e-market.*

D. Monitoring

1. Memonitor proses pengelolaan data *e-market.*
2. Menjaga kehandalan kendali internal dalam *e-market.*